



Peran BPK dalam Mendorong Implementasi GRC Terintegrasi Dalam Mencapai Tujuan BUMD Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi

Oleh Dr. Sri Haryati, S.E., M.M.
Kepala Sub Auditorat DKI Jakarta II
BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Keuangan Negara, BUMD & Tujuan Pendiriannya

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
(UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Tujuan Pendirian BUMD adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)





Pemprov DKI Jakarta memiliki kepemilikan di 23 perusahaan (13 mayoritas, 1 dengan kepemilikan 50%, dan 9 minoritas (di bawah 50%) dengan kepemilikan masing-masing diantaranya sbb:

Transportasi



MRT Jakarta (99,97%)



Trans Jakarta (99.36%)



new armada

Ratax Armada (28%)

Properti



Sarana Jaya (100%)



PT Jakarta Internasional
Expo (13.13 %)

Keuangan



Bank DKI (99.97%)



Jamkrida (98.3%)



Asuransi Bangun Askrida (4.47%)

Infrastruktur

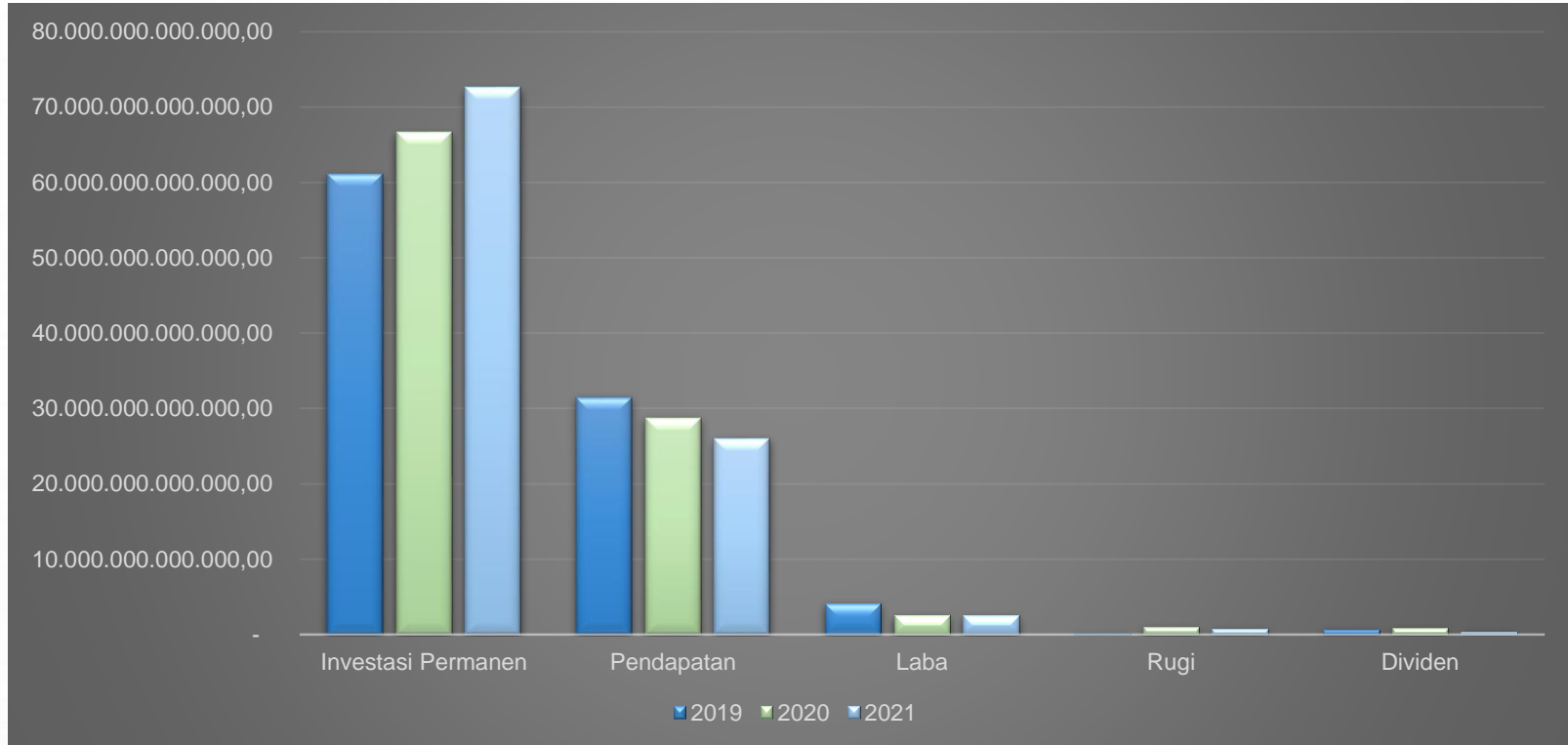


JakPro (99.98%)

PT Pembangunan
Jaya (38.8 persen)

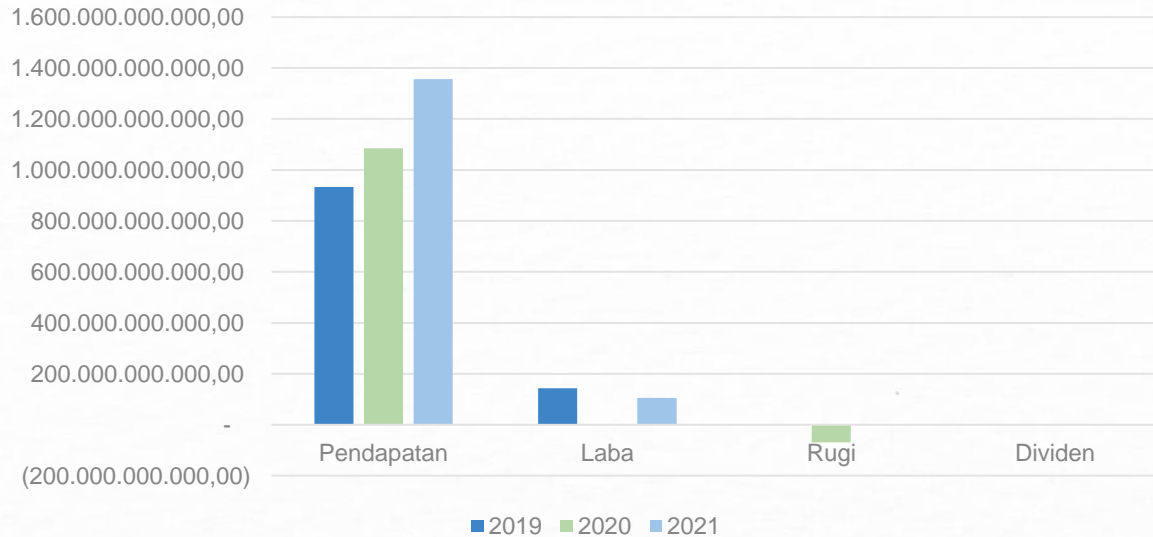
Trend Pendapatan, Laba/Rugi, dan Dividen BUMD

Tahun	Investasi Permanen	Pendapatan	Laba	Rugi	Dividen
2019	61.060.348.693.774,00	31.453.578.955.234,00	4.141.644.464.774,00	179.057.129.385,00	644.737.504.622,00
2020	66.616.669.815.924,00	28.736.992.836.799,00	2.519.557.965.616,00	945.590.214.790,00	807.637.805.521,00
2021	72.600.176.669.216,00	26.002.033.977.527,00	2.510.715.385.559,00	757.139.163.654,00	398.792.009.852,00



Trend Pendapatan, Laba/Rugi, dan Dividen PT MRT

Tahun	Pendapatan	Lab	Rugi	Dividen
2019	933.229.529.446,00	143.379.790.914,00	-	-
2020	1.085.497.999.575,00		- 69.094.357.504,00	-
2021	1.355.917.000.000,00	105.533.000.000,00	-	-





VISI DAN MISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.



MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.



Jenis Pemeriksaan BPK

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN



PEMERIKSAAN KINERJA

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- PEMERIKSAAN KEPATUHAN
- PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Regulasi Pemeriksaan BPK:

- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara



Kebijakan dan Regulasi terkait GRC



Contoh Kebijakan dan Regulasi terkait GRC:

- a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) BUMD;
- b. Pergub 92/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Pergub 107/2019 Tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu;
- d. Pergub 15/2020 tentang penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai pengelola kawasan berorientasi transit koridor utara-selatan Mass Rapid Transit Jakarta.



Governance, Risk and Compliance



Source:
globalriskacademy.com



Untuk itu manajemen perlu melakukan



Strategi-strategi perubahan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasca pandemi

Koordinasi dengan pihak terkait





Hal Yang Penting Dalam Implementasi GRC





Hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Aktivitas BUMD terkait Implementasi GRC:



Penguatan regulasi dan tata kelola penggunaan dana PMD atau investasi pemerintah pada BUMD

Perikatan kerja sama dan pelaksanaan kegiatan diupayakan untuk memaksimalkan keuntungan BUMD dan pemda, memperkuat koordinasi dan rekonsiliasi dengan stakeholder di lingkungan Pemda

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara kegiatan yang dilaksanakan harus merujuk pada regulasi terkait

Peningkatan aktivitas pengendalian oleh top manajemen atas kegiatan yang dilakukan oleh BUMD

Memetakan dan memitigasi risiko secara komprehensif



TERIMA KASIH

